

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Pengertian akan objek yang diteliti merupakan unsur dalam pemahaman, maka dari itu peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu negara yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut maka semakin tinggi juga kemampuan negara itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga semakin tinggi juga kemampuan negara tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Peningkatan ini disebabkan oleh

faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan jumlah dan kualitas (Hodijah & Angelina, 2021).

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kapasitas berbagai barang ekonomi pada sebuah negara dalam jangka panjang (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju perubahan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, bagi suatu negara indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan pada masa yang akan datang (Shintya & Wahyudi, 2022).

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara, diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDB_t : Produk Domestik Bruto tahun tertentu

PDB_{t-1} : Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

t : tahun tertentu

2.1.1.2 Produk Domestik Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara adalah Produk Domestik Produk (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu periode tertentu. Dalam analisis makro ekonomi dikenal dengan istilah pendapatan nasional atau *national income* yang menyatakan nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku (nominal) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur PDB, diantaranya:

1. Pendekatan Produksi (*Output Approach*)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dengan menggunakan nilai barang akhir atau menjumlahkan nilai tambah (*value added*) semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun.

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + \dots (Q_n \times P_n)$$

Dimana:

Y : Pendapatan nasional (PDB)

Q₁ : Jumlah barang dan jasa ke-1

P₁ : Harga barang dan jasa ke-1

Q_n : Jumlah barang dan jasa ke-n

P_n : Harga barang dan jasa ke-n

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.

$$Y = r + w + i + p$$

Dimana:

Y : Pendapatan nasional (PDB)

r : sewa (*rent*)

w : upah/gaji (*wage*)

i : bunga modal (*interest*)

p : keuntungan (*profit*)

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana:

Y : Pendapatan nasional (PDB)

C : Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I : Investasi

G : Pengeluaran konsumsi pemerintah

(X-M) : Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

2.1.1.3 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi.

1. Faktor Ekonomi

a. Sumber Daya Manusia

Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sumber daya manusia. Dimana pertumbuhan ekonomi sendiri tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya manusianya saja tetapi juga lebih kepada efesiansinya. Jumlah penduduk yang meningkat tajam bisa menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dengan pembentukan modal dan pendapatan perkapita yang rendah membuat suatu negara semakin sulit untuk menopang pertumbuhan jumlah penduduk tersebut.

b. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, hasil laut, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

c. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan

kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

d. Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi menjadi unsur yang vital dalam proses pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dewasa ini, terjadi ledakan-ledakan teknologi baru, khususnya dalam informasi, komputasi, komunikasi dan sains kehidupan. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk atau jasa baru. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

2. Faktor Non Ekonomi

a. Sosial Budaya

Di negara terbelakang terdapat tradisi sosial dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi, misalnya sikap orang yang menyerah kepada takdir dan tidak suka kerja keras, lebih menghargai waktu senggang, kesenangan, pesta-pesta dan adat kebiasaan. Dengan begitu masyarakat menghabiskan uang kepada usaha-usaha non ekonomi. Dengan kata lain, pandangan budaya bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Demi kemajuan ekonomi suatu daerah maka diperlukan perubahan pada Lembaga terkait sehingga tabungan dapat lebih di tingkatkan dan dapat dialihkan menjadi modal yang produktif. Dengan demikian maka perlu didirikan

lembaga keuangan negeri maupun swasta seperti bank tabungan, bank investasi, bursa modal dan lain-lain.

b. Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju merupakan hasil dari stabilitas politik dan administrasi yang kokoh. Dimana stabilitas, ketertiban dan adanya perlindungan hukum mendorong kewirausahaan, dengan adanya pasar yang luas, mobilitas faktor dan kemajuan teknologi dapat membantu merangsang usaha dan inisiatif. Hal itu dapat dicapai jika administrasi yang bersih dan kondisi politik yang stabil.

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal

akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan per kapita sama dengan produksi marginal. Dengan terbatasnya jumlah tanah, maka pertumbuhan penduduk akan menurunkan produk marginal yang kemudian dikenal dengan istilah *law of diminishing return* atau hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Dengan demikian penambahan penduduk justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun dan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam Analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi, sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang

modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*).

4. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.

5. Teori Pertumbuhan Keynes

John Maynard Keynes (1936) mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal dalam teori ekonomi makro sebagai *Keynessian Revolution* (Revolusi Keynesian). Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah). Teori Keynes dilatarbelakangi oleh situasi depresi pada tahun 1929-1930 sehingga dianggap relevan untuk tujuan stabilisasi jangka pendek dan bukan untuk memecahkan persoalan jangka panjang dalam pembangunan. Keynes membuat pernyataannya yang sangat revolusioner dalam ekonomi makro dibangun berdasarkan observasi. Observasi pertama, pasar dalam tatanan ekonomi modern dapat terjebak dalam ekuilibrium kekurangan (*underemployment equilibrium*). Observasi kedua yaitu melalui kebijakan moneter

dan fiskal, pemerintah dapat menstimulus ekonomi dan membantu menjaga produksi dan pekerjaan setinggi-tingginya.

2.1.1.5 Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh bank dunia atau lembaga internasional lainnya.
3. Sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya Burkhead and Winer mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan Welsh memberikan definisi

anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat (rakyat). Jadi masyarakat dibebani biaya untuk penyelenggaraan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutan-pungutan berupa pajak-pajak, bea dan cukai dan lain-lain pungutan. Untuk memperkirakan berapa besarnya iuran-iuran (pungutan) itu maka direncanakan anggaran pendapatan (LPEM, 1993). Dari pendapat tersebut maka secara umum pengertian terhadap anggaran negara adalah:

1. Mewujudkan suatu rencana keuangan negara/pemerintah.
2. Mewujudkan suatu rencana pembangunan nasional.
3. Mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara.
4. Mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara.
5. Berlaku selama satu tahun anggaran.

Pengertian secara khusus, dalam arti yang digunakan dalam praktek kenegaraan di Indonesia, maka pengertian anggaran negara yang selanjutnya disebut APBN dapat mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), dimana dinyatakan bahwa, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pengertian pasal tersebut terdapat lima unsur dari APBN, yaitu:

1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara.

2. APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk satu tahun.
3. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.
5. APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ini menunjukkan peran ekonomi politik APBN).

2.1.2.2 Fungsi APBN

Sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakana APBN-nya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

1. Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara, alokasi anggaran

pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

2. Anggaran Kesehatan

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang kesehatan. Anggaran kesehatan diantaranya diarahkan untuk program seperti:

- a. Peningkatan kualitas layanan kesehatan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN.
- c. Mendorong *supply side* melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.
- d. Mendorong pola hidup sehat melalui germas.
- e. Peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi.
- f. Percepatan penurunan stunting melalui skema *program for result*.
- g. Pemerataan akses layanan Kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema KPBU.

3. Anggaran Perlindungan Sosial

Anggaran perlindungan sosial merupakan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan dan jaminan sosial yang berasal dari APBN. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat supaya dapat menghadapi berbagai kerentanan atau guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan

perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Program perlindungan sosial diberikan melalui:

a. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah program berupa pemberian bantuan yang bersifat tanpa iuran (*non-contributory*) yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Sasaran program bantuan sosial adalah masyarakat miskin dan rentan. Basis data penerima bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dikenal juga dengan asuransi sosial adalah program yang bersifat *contributory*, yaitu adanya kontribusi iuran dari peserta, pemberi kerja, dan pemerintah. Sasaran program jaminan sosial adalah seluruh masyarakat Indonesia. Program jaminan sosial diantaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang wajib untuk seluruh masyarakat, jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib untuk seluruh pekerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kemudian program perlindungan sosial lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta subsidi listrik dan LPG.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.3.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

2.1.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Melalui program *Mortpack*, dihasilkan estimasi angka harapan hidup 4 tahun sebelum tahun survey. Maka untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun survey dilakukan *fitting model* dari beberapa data history. Untuk mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir tahun 2008, digunakan beberapa sumber data yaitu

SP 2000, SUPAS 2005, Susenas 2006, dan Susenas 2007. Selanjutnya dilakukan *fitting model* untuk mendapatkan angka harapan hidup tahun 2008. Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot satu per tiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan Badan Pusat Statistik dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z
 \end{aligned}$$

dan seterusnya.

Dimana:

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita.

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500,- per kapita per tahun atau Rp.1.500,- per kapita per hari.

2.1.3.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan. Manfaat penting indeks pembangunan manusia antara lain sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dalam hal ini merupakan masyarakat atau penduduk.

2. Indeks pembangunan manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
3. Bagi Indonesia, indeks pembangunan manusia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.3.4 Perbedaan Metode Lama dan Baru

UNDP memperkenalkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding dengan metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks. Berikut merupakan tabel perbedaan indikator metode lama dan metode baru UNDP:

Tabel 2. 1 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH) Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator angka melek huruf yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB

per kapita. Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi Indeks Pembangunan Manusia menjadi optimal. Berikut merupakan keunggulan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lainnya. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena semua sama pentingnya.

2.1.3.5 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Rumus metode baru yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimana:

$I_{kesehatan}$: Indeks Kesehatan

AHH : Angka Harapan Hidup

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup (minimal)

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup (maksimal)

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimana:

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah (minimal)

HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah (maksimal)

I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah (minimal)

RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah (maksimal)

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Dimana:

\ln : logaritma natural

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia metode lama, sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$indeks X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana:

$X_{(i,j)}$: Komponen IPM ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$: Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

$X_{(i-\max)}$: Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Nilai Minimum dan Maksimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	
Daya Beli	732,720	300,000 (1996) 360,000 (1999,2002)	Pengeluaran Per Kapita Rill d disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk menghitung IPM, terlebih dahulu dihitung Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X_{(i,j)}$$

Dimana:

Indeks $X_{(i,j)}$ = Indeks Komponen IPM ke i untuk wilayah ke j

i = 1, 2, 3

j = 1, 2, k wilayah

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008-2022.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Safira, Sjamsu Djohan, Nurjanana (2019) "Pengaruh Pengeluaran	Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi	Anggaran Perlindungan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran.	Jurnal FEB Universitas Mulawarman, Forum Ekonomi 21 (2) 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur”			pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan anggaran kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terdapat pengaruh negatif signifikan anggaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.	ISSN: 1411-1713
2.	Paulo Grasio Izaak Kawatu, Daisy S. M. Engka, Krest D. Tolosang (2018) “Pengaruh Anggaran Kesehatan, Pendidikan dan sosial terhadap tingkat kemiskinan kabupaten Minahasa”	Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan dan Anggaran sosial	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan	Kebijakan di bidang kesehatan yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan di bidang pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa, atau dengan kata lain kebijakan dibidang	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 03 Tahun 2018 Universitas Sam Ratulangi Manado

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan di bidang Sosial yaitu Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) tidak memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa.</p>	
3.	<p>Affandi, T. Zulham, Eddy Gunawan (2017) “Pengaruh Anggaran Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh”</p>	<p>Anggaran Pendidikan</p>	<p>Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan, Produk Domestik Regional Bruto</p>	<p>Anggaran pendidikan dan ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB.</p>	<p>Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 4 Nomor 2, November 2017 E-ISSN: 2549-8355</p>
4.	<p>Wawan Aryanto, Riya Dwi Handaka (2018) “Analisis pengaruh belanja modal, Indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Belanja Modal, Tenaga Kerja, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial</p>	<p>Dengan taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Semua variabel eksogen terbukti berpengaruh positif signifikan</p>	<p>Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univertas 17 Agustus 1945 Jakarta,</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terserap terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia”			terhadap pertumbuhan ekonomi.	ISSN (E): 2502-6704
5.	Made Praba Utami Pramesti, I Nyoman Mahaendra Yasa, I Wayan Wenagama (2020) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem”	Pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia, Anggaran Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	E-Jurnal EP Unud, 11[07]: 2669-2695 ISSN: 2303-0178
6.	Farathika Putri Utami (2020) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”	Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan, Pengangguran, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial	IPM, kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 4, No. 2 September 2020 P-ISSN 2549-4104 E-ISSN 2685-4287
7.	Asnidar (2018) “Pengaruh	Indeks Pembangunan	Inflasi, Anggaran	Hasil uji koefisien	Jurnal Samudra

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur”	Manusia, Pertumbuhan ekonomi	Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial	determinasi sebesar 0,469 atau sebesar 46,9% variabel Indeks Pembangunan Manusia dan variabel Inflasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.	Ekonomika, Vol. 2, No. 1, April 2018
8.	Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, Nurul Huda (2020) “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia	Kemiskinan, Tingkat Pengangguran	Secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM yaitu ditunjukkan dengan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan oleh nilai	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 212-222 ISSN: 2477-6157; E-ISSN: 2579-6534

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Secara simultan semua variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap IPM dan memiliki pengaruh yang ditunjukkan melalui R^2 sebesar 80,78% yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya sebesar 19,22% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini.</p>	
9.	<p>Heppi Syofya (2018) “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia”</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>Tingkat Kemiskinan, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial</p>	<p>Angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.</p>	<p>Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 15. No. 2, September 2018 EISSN: 2442-9813 ISSN: 1829-9822</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Suripto, Lalu Subayil (2020) “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta periode 2010-2017”	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial	Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 2, 2020 p-ISSN: 2621-3842 e-ISSN: 2716-2443
11.	Merlin Anggraeni (2017) “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Anggaran Perlindungan Sosial	Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB, variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Universitas Yogyakarta, Volume 6, No. 5, Tahun 2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indonesia Periode 1970- 2015”			PDB, variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB, kemudian variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek.	
12.	Dita Ayu Anantika, Hadi Sasana (2020) “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC”	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia	Korupsi, Anggaran Perlindungan Sosial	Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan variabel korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	Diponegoro Journal of Economics, Volume 9, No. 3, Tahun 2020, Halaman 167/1 ISSN: 2337- 3814

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Nur Baeti (2013) “Pengaruh Pengguguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia	Pengguguran,	Pengguguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Ekonomi Pembangun an Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang ISSN: 2252- 6889
14.	Hadi Sasana (2012) “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”	Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Pemerintah Daerah, Pendapatan Per Kapita, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Perlindungan Sosial	Pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.	Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 25, No. 1 Januari 2012 ISSN: 0854- 1442
15.	Meylina Astri, Sri Indah Nikensari, Harya Kuncara W. (2013) “Pengaruh Pengeluaran	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Indeks	Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Perlindungan Sosial	Secara bersama- sama pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan	Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.1 No.1 Maret 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”	Pembangunan Manusia		kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.	ISSN: 2302-2663

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Anggaran Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan mampu mengubah manusia yang awalnya tidak memiliki kecakapan, menjadi lebih produktif. Selain itu, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dan sebagai penentu di mana sumber daya digunakan dengan efisien dalam memproduksi barang dan jasa. Ketika rata-rata pendidikan masih rendah, hal tersebut akan mengakibatkan penerapan dari teknologi baru yang terus meningkat tidak akan diikuti dengan peningkatan output. Efisiensi dalam penggunaan teknologi mengharuskan tenaga kerja memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan, menurut Mankiw (1992) dengan melakukan perbaikan pada kualitas modal manusia dapat

mengembangkan sumber daya manusia, modal manusia tersebut mengacu pada pendidikan. Pendidikan itu sendiri memiliki peranan yang sangat vital dalam menciptakan kemampuan suatu negara berkembang untuk memperoleh sumber daya manusia yang produktif sehingga dapat menyerap bahkan menciptakan teknologi terkini dan untuk terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara. Dalam penelitian (Affandi, dkk, 2017) menyatakan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Safira, dkk, 2019) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Hubungan Anggaran Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu aspek sumber daya manusia yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan

kesehatan. Kesehatan merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Kesehatan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk memperoleh sumber daya manusia bermutu yang berguna untuk menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat yang sehat tentunya dapat menjalankan aktivitas sehingga akan lebih produktif dibandingkan dengan orang yang sakit. Dengan begitu kegiatan ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Maka dari itu pemerintah mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan melalui anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara seperti tenaga kesehatan, berbagai macam obat, puskesmas, dan rumah sakit sebagai upaya menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aprilany, dkk, 2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian (Safira, dkk, 2019) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Hubungan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum program perlindungan sosial memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial dengan berupaya meningkatkan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan.

Indonesia sudah memiliki beberapa program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kartu Pra Kerja, dan lain sebagainya. *International Labour Organization* (ILO) (1984) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian.

Peran penting perlindungan sosial tercermin dalam kebijakan pemerintah atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan program kebijakan komprehensif untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian adalah program perlindungan sosial. Keberadaan program perlindungan sosial ini memberi manfaat terutama bagi penduduk miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Untuk mewujudkan program perlindungan sosial tersebut, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk perlindungan kesehatan dan jaminan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai anggaran perlindungan sosial, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suranto, dkk, 2021) menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Novi Suciati (2018) yang menyatakan anggaran perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh

(Angga & Fikriah, 2020) menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia.

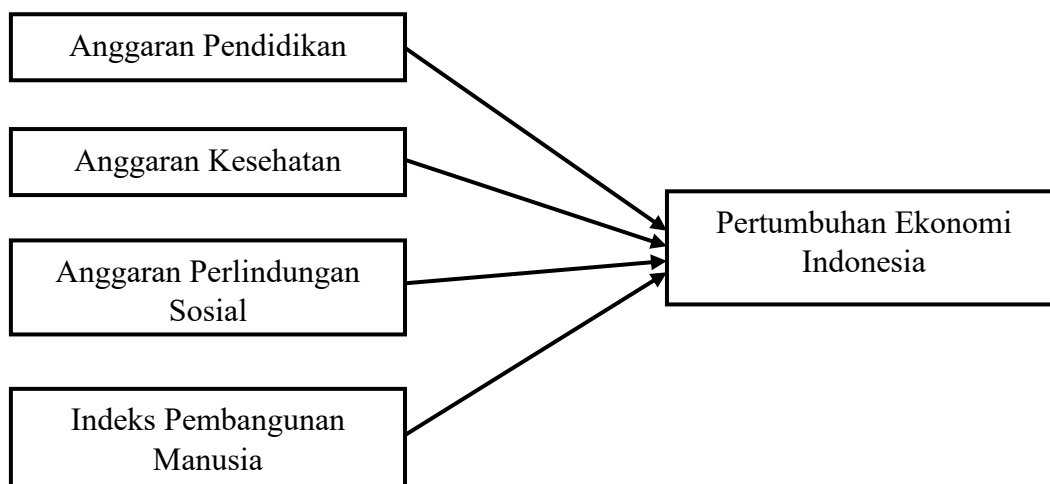
2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator majunya suatu negara. Negara dikatakan maju tidak hanya dilihat dari nilai pendapatan domestik brutonya saja, tetapi juga dilihat dari aspek harapan hidup masyarakat, pendidikan masyarakat dan juga standarisasi hidup layak yang memang dicerminkan lewat angka indeks tersebut (*Human Centered Development*). Jika standarisasi kehidupan yang layak sudah didapatkan oleh masyarakat, maka akan meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan tercerminkan lewat pendapatan domestik bruto. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, manusialah yang akan berperan aktif dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aryanto dan Handaka, 2018) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh (Siti dan Fadlan, 2021) yang menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian terhadap penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan ekonomi, anggaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia, maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008-2022.
2. Diduga secara bersama-sama anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008-2022.